

Indonesia dan Pasifik Barat Daya: Australia, Selandia Baru dan Papua Nugini

Alfian MUTHALIB*

AUSTRALIA

Dalam awal diplomasi Indonesia setiap perundingan dengan Belanda dalam menyelesaikan pertikaian antara mereka selalu dihadiri oleh pihak ketiga.¹ Salah satu contoh adalah kehadiran pihak Inggris yang diwakili oleh Sir Archibald Clark Kerr dan kemudian digantikan oleh Lord Killeen membantu mempertemukan Indonesia dan Belanda di meja perundingan. Pentingnya peranan pihak ketiga itu diperkirakan semakin dibutuhkan ketika Indonesia dan Belanda menemui jalan buntu di Perundingan Hoge Veluwe dalam bulan April 1946.² Pengalaman-pengalaman pahit yang mendasari perundingan-perundingan dengan Belanda itu akhirnya cenderung memberikan suatu unsur bentuk dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia setelah tahun-tahun pertama kemerdekaannya. Unsur bentuk itu adalah mencari simpati atau dukungan pihak ketiga untuk membantu Indonesia mempertahankan kepentingannya, dan memperkuat posisi tawar-menawarnya.

Proses perkembangan hubungan Indonesia dengan Australia sangat erat berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia seperti disebutkan di atas. Tetapi terjadinya hubungan itu tidak begitu mudah, karena Australia pada mulanya masih ragu-ragu mendukung kebijakan luar negeri Indonesia itu. Partai Buruh menghadapi suatu pilihan yang pelik antara mendukung Indonesia dan mempertahankan status-quo Belanda. Kalau Partai Buruh mendukung Belanda, maka itu berarti membelakangi ideologi partai-

*Staf CSIS.

¹Lihat J. Soedjati Djiwandono, "An Analysis of the Use and Role of a Third Party in the Settlement of International Disputes with Special Reference to Indonesian-Soviet Relations" (Ph.D. dissertation, University of London, 1982), hal. 38.

²*Ibid.*, hal. 48.

ping itu perdebatan-perdebatan mengenai kasus Irian Barat di PBB menunjukkan bahwa negara-negara Asia-Afrika yang baru merdeka dan Uni Soviet mendukung Indonesia. Hal itu memperkuat politik anti-kolonialisme Indonesia terhadap Belanda di Irian Barat.

Sebaliknya Irian merupakan suatu kepentingan yang tersendiri bagi Australia. Pulau itu dianggap sebagai suatu kubu terhadap kemungkinan intervensi militer dari Asia. Persepsi Australia itu terbukti dalam Perang Dunia Kedua ketika Australia harus menghadapi intervensi Jepang di Irian. Oleh karena itu, setelah Perang Dunia Kedua, Irian secara keseluruhannya dianggap sebagai perimeter pertahanan Australia. Pemerintahan Partai Buruh di bawah Perdana Menteri Chifley cenderung tidak begitu melibatkan Australia dalam kasus Irian Barat. Pemerintah Partai Buruh hanya menyarankan supaya kasus Irian Barat ditunda sampai tercapai suatu kesepakatan antara kedua pihak yang bertikai. Usul ini merupakan pencerminan sikap Partai Buruh pada waktu itu.⁵ Dengan cara tidak memihak kepada salah satu pihak yang bertikai, maka Partai Buruh berhasil mempertahankan status quo Irian Barat. Dengan demikian keamanan Australia tidak akan terancam, dan yang lebih penting adalah hubungan kedua negara dapat dipertahankan dengan baik.

Kemenangan Partai Liberal membawa perubahan-perubahan dalam kebijakan luar negeri Australia. Gaya diplomasi Partai Liberal sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran konservatif yang sangat menekankan pada aliran realisme, dan loyalitas dalam politik.⁶ Pengaruh unsur-unsur itu membuat Australia lebih mementingkan hubungannya dengan negara-negara pelindungnya dan negara-negara sahabat. Pelaksanaan dari kebijakan itu terungkap dengan dibentuknya ANZUS yang dianggap sebagai poros keamanan Australia.⁷ Jadi dasar politik luar negeri Partai Liberal adalah politik pertahanan. Dalam usaha-usaha Australia mencari perlindungan keamanan terhadapnya itu, hubungan dengan Indonesia dianggap kurang bermanfaat. Akibatnya, usaha-usaha diplomasi Indonesia untuk menyelesaikan masalah Irian Barat dipandang sebagai ancaman bagi prinsip utama kebijakan luar negeri Australia. Prinsip utama itu adalah menjamin keamanan Australia. Ini diinterpretasikan bahwa Irian Barat harus dipertahankan supaya tidak jatuh ke tangan Indonesia. Caranya adalah mendukung Belanda atau melibatkan

⁵Alan Renouf, *The Frightened Country* (Melbourne: The McMillan Co. of Australia Pty. Ltd., 1979), hal. 406.

⁶F.A. Mediansky, "The Conservative Style in Australia," *The Australian Outlook*, Vol. 28, No. 1 (April 1974), hal. 51-52.

⁷Harry G. Gelber, "Australia and the Great Powers," *Asian Survey*, Vol. XV, No. 3 (March 1975), hal. 190.

oleh Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat. Ini berarti Australia mengubah politik luar negerinya dengan mengorbankan kepentingan utamanya demi hubungan baik dengan Indonesia.

Konfrontasi Malaysia

Pada mulanya Indonesia tidak menentang pembentukan Federasi Malaysia. Kemungkinan hal itu disebabkan Indonesia masih terlibat dalam perjuangan merebut Irian Barat sehingga sulit baginya untuk membuka dua medan dalam waktu yang bersamaan. Atau pernyataan menentang pembentukan Federasi Malaysia itu akan dapat diinterpretasikan sebagai suatu ketamakan atau ekspansi ke arah daerah perbatasan sebelah utaranya.¹¹ Tetapi sikap Pemerintah Indonesia segera berubah ketika perundingan mengenai Irian Barat menguntungkan Indonesia.¹² Keberhasilannya dalam menjalankan politik konfrontasi terhadap Belanda di Irian tampaknya merangsang Indonesia untuk menerapkan model diplomasi itu kembali terhadap Malaysia. Pertama, kemenangan itu memperkuat posisi Pemerintah Indonesia di dalam dan luar negeri. Kedua, Indonesia mempunyai suatu kapabilitas militer yang mampu memproyeksikan ancamannya terhadap negara-negara tetangganya yang terdekat.¹³ Unsur itu diperkuat oleh persepsi ancaman Indonesia terhadap Malaysia dan Singapura, karena kedua negara itu pernah membantu Pemberontakan PRRI melawan Pemerintah Indonesia dalam tahun-tahun 1957, 1958.¹⁴

Pada saat yang sama, kelompok-kelompok yang berpengaruh dalam sistem politik di Indonesia juga memainkan bagian-bagian penting menentang pembentukan Malaysia, terutama sekali Partai Komunis Indonesia. Masalah Malaysia bagi PKI merupakan suatu peluang utama untuk memperkuat posisinya di dalam negeri serta mengisolasi Indonesia dari negara-negara Barat. Dalam mencapai tujuannya itu, harian-harian kiri seperti Bintang Timur dan Partindo menginterpretasikan pembentukan Malaysia sebagai suatu bentuk kolonialisme baru dan menuduh Tengku Abdulrachman bertujuan untuk menentang Indonesia. Pendapat umum harian-harian itu kemudian diperkuat dengan resolusi CCPKI pada tanggal 30-31 Desember 1961.¹⁵ Tetapi baik Pemerintah Indonesia maupun Partai Komunis Indonesia

¹¹J.A.C. Mackie, *Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia Dispute, 1963-1966* (Kualalumpur: Oxford University Press, for the Australian Institute of International Affairs, 1974), hal. 103.

¹²I.A.A. Agung, *Twenty Years*, hal. 458.

¹³J.A.C. Mackie, *Konfrontasi*, hal. 95.

¹⁴C.L.M. Penders, *The Life and Times of Soekarno* (Great Britain: Sidgwick & Jackson, 1974), hal. 176.

¹⁵J.A.C. Mackie, *Konfrontasi*, hal. 104.

Kasus Timor Timur

Kasus Timor Timur merupakan batu uji berikutnya bagi hubungan Indonesia dengan Australia setelah Indonesia meninggalkan politik konfrontasinya terhadap negara-negara imperialis. Krisis Timor Timur pada mulanya merupakan konflik internal yang mengundang unsur kekuatan luar, sehingga menjadi konflik eksternal. Kalau dalam tahun-tahun pertama kemerdekaan dan periode politik konfrontasi Irian Barat dan Malaysia, Indonesia aktif mencari negara kuat sebagai kekuatan ketiga untuk merealisasi kebijakannya tersebut, sebaliknya dalam krisis Timor Timur justru Indonesia dibutuhkan sebagai kekuatan ketiga menyelesaikan krisis itu.

Penyelesaian kasus Timor Timur ini agak berbeda dari penyelesaian kasus Irian Barat. Indonesia dalam hal ini melihat perlunya pihak Australia diikutsertakan juga sebagai partai utama dalam menyelesaikan konflik Timor Timur. Pendekatan bilateral itu dilakukan oleh Indonesia dengan mengundang PM G. Whitlam ke Indonesia pada tanggal 5-7 September 1974. Dalam pembicaraan Soeharto-Whitlam di Wonosobo itu, Whitlam setuju diadakannya penyatuan Timor Timur dengan Indonesia melalui penentuan nasib sendiri. Dia melihat bahwa integrasi adalah jauh lebih penting daripada penentuan nasib sendiri. Penilaiannya itu bertolak belakang dengan keputusan Departemen Luar Negeri Australia yang telah lebih dahulu menentukan bahwa kebijakan Australia mengenai Timor Timur adalah "penentuan nasib sendiri."¹⁹

Dengan lebih menekankan prinsip integrasi lebih dahulu itu, maka Whitlam secara praktis memberikan Timor Timur kepada Indonesia.²⁰ Perubahan kebijakan luar negeri Australia itu dapat diinterpretasikan bahwa Timor Timur dalam suatu pengertian militer tidak lagi mempunyai arti strategis bagi Australia, dan secara jelas mengartikulasikan pentingnya hubungan dengan Indonesia. Tetapi dengan terjadinya peralihan dari Pemerintah Whitlam ke Pemerintah Partai Liberal, PM Frazer, hubungan Indonesia-Australia kembali mengalami guncangan-guncangan. Laporan-laporan pribadi yang dikembangkan antara Presiden Soeharto dan Whitlam tidak lagi dikembangkan dalam pemerintahan Frazer.²¹ Frazer cenderung membelokkan kembali orientasi politik luar negeri Australia ke Eropa dan Amerika Serikat, dan memandang Asia Tenggara sebagai sesuatu kawasan yang kurang penting.²² Sebagai akibatnya, kepentingan-kepentingan dan prinsip-prinsip yang

¹⁹Alan Renouf, *The Frightened*, hal. 442.

²⁰Peter Hastings, "The Timor Problem-I," *The Australian Outlook*, Vol. 29, No. 1 (April 1975), hal. 19.

²¹Philip J. Eldridge, *Indonesia and Australia: The Politics of Aid and Development Since 1966*, R.T. Shand (ed.), (Canberra: The Australian National University, 1979), hal. 24.

²²J.L. Girling, "Australian and Southeast Asia in the Global Balance," *The Australian Outlook*, Vol. 31, No. 1 (April 1977), hal. 3.

mencari dukungan dari pihak sayap kiri untuk memodifikasi program partai tersebut. Di samping itu ia berusaha mendapatkan suatu akomodasi dari pihak Indonesia. Sedangkan Indonesia merasa khawatir akan timbulnya suatu fokus sayap kiri yang kuat sehingga mampu memaksa Pemerintah Australia mengubah sikapnya di PBB. Berbalikinya sikap Australia itu diperkirakan akan mempengaruhi negara-negara kecil di Pasifik Selatan dalam memberikan suara mereka di PBB. Jadi baik Pemerintah Australia maupun Indonesia mempunyai suatu keprihatinan yang sama terhadap ulah Partai Buruh.

Untuk menjembatani kesenjangan itu, Menlu Bill Hayden dalam perundingannya dengan pihak Indonesia mencoba memasukkan salah satu gagasan dari program Partai Buruh, yaitu mengenai penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Di samping menegaskan bahwa Australia "mencatat penggabungan Timor Timur dengan Indonesia."²⁵ Pernyataan itu penting karena ia menunjukkan bahwa Pemerintah Partai Buruh tidak menolak atau mengakui kebijakan pemerintah sebelumnya. Dengan demikian bisa mengurangi tekanan-tekanan dari kelompok sayap kiri dari Partai Buruh. Sebaliknya dengan digunakan istilah "mencatat" itu Pemerintah Partai Buruh sulit menentukan sikapnya dalam sidang PBB yang direncanakan akan diadakan dalam bulan Oktober 1983, meskipun sidang Timor Timur tidak masuk agenda dalam tahun itu. Kepastian sikap Pemerintah Australia bergantung pada hasil perdebatan di Parlemen Australia. Jadi yang penting adalah mempengaruhi pihak-pihak tertentu di parlemen selama tenggang waktu itu.

Kunjungan bulan Juli oleh PM Robert Hawke ke Jakarta dapat dilihat dalam konteks tersebut. Hawke memperkirakan suatu kunjungan misi gabungan Parlemen Australia ke Timor Timur mampu mempengaruhi sikap kelompok sayap kiri Partai Buruh di Parlemen. Tujuan misi itu sendiri kabur. Karena selain diartikan untuk mencari masukan ia dapat pula diinterpretasikan sebagai komisi penyelidikan yang dapat menimbulkan suatu preseden. Tetapi karena pihak Indonesia percaya bahwa masalah penyelesaian Timor Timur bergantung pada kemauan baik politik dari kedua pihak, pengiriman misi tersebut diterima. Ternyata kunjungan itu tidak berhasil mengubah sikap negatif sayap kiri Partai Buruh terhadap kasus Timor Timur.²⁶ Akibatnya usaha Pemerintah Hawke untuk memodifikasi program Partai Buruh melalui parlemen mengalami kegagalan.

Perubahan penting terjadi dalam Konperensi Nasional Partai Buruh dalam bulan Juli 1984 dengan munculnya kelompok kiri tengah. Untuk menjatuhkan dominasi kelompok sayap kiri di parlemen, Hawke mencoba membangun kekuatan sayap kanan melalui kerjasama dengan kelompok kiri tengah. Hal

²⁵Manggi Habir, "On the Tightrope," *FEER*, 21 April 1983, hal. 11.

²⁶Warwick Beutler, "Look Right, Look Left," *FEER*, 29 September 1983, hal. 42.

Hal itu terungkap dalam sikap Selandia Baru yang tidak mendukung resolusi Konperensi Negara-negara Asia di New Delhi pada tahun 1949 dalam mendesak Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengutuk aksi polisional Belanda.²⁹ Akan tetapi sikap Selandia Baru segera berubah ketika Amerika Serikat berhasil menekan Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi setelah Perang Dunia II, lebih-lebih setelah kejayaan Inggris mulai pudar dan perimbangan kekuatan dunia sudah berubah, Selandia Baru merasa perlu menilai kembali kebijakan luar negerinya. Dalam arti lain Selandia Baru mulai menyadari bahwa dia tidak berada di Eropa tetapi di Pasifik Selatan dekat dengan Asia.

Paralel dengan kebijakannya itu, Selandia Baru mulai mendekati Indonesia melalui bantuan diplomatik dan hubungan perdagangan seperti Colombo Plan dan program bantuan teknis. Meskipun demikian ikatan-ikatan tersebut tidak mampu membendung perbedaan-perbedaan kepentingan nasional kedua negara. Indonesia mulai melansir politik bebas-aktif dan menolak diadakannya setiap bentuk pakta militer di kawasan ini. Sebaliknya, Selandia Baru mendukung ide regionalisme dan sistem keamanan bersama.³⁰ Masuknya Selandia Baru ke dalam ANZUS, SEATO, dan AMDA semakin merealisasi divergensi politik dengan Indonesia. Indikasi divergensi itu mulai tampak ketika pihak Indonesia tidak mengundang Selandia Baru untuk berpartisipasi dalam Konperensi Asia-Afrika di Bandung. Bibit-bibit keretakan itu kemudian menemui titiknya ketika Indonesia melansir politik konfrontasi terhadap Belanda di Irian Barat dan kemudian terhadap pembentukan Malaysia. Politik konfrontasi itu mengakibatkan menurunnya bantuan luar negeri yang disumbangkan oleh Selandia Baru melalui Colombo Plan kepada Indonesia. Meskipun demikian Selandia Baru tetap mempertahankan hubungannya dengan Indonesia. Hal itu terlihat tetap dipertahankannya pejabat-pejabat diplomatik Selandia Baru dan kunjungan delegasi Parlemen Selandia Baru ke Indonesia dalam tahun 1963.

Peralihan dari rezim yang lama ke rezim baru di Indonesia membawa perubahan dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Sementara politik konfrontasi ditinggalkan, Indonesia segera mengadakan suatu pendekatan kerjasama regional dengan negara-negara di Asia Tenggara. Konsep regional yang dianut oleh Indonesia itu didukung oleh Selandia Baru. *Pertama*, pembentukan kerjasama regional dengan negara-negara di Asia Tenggara itu menciptakan stabilitas di kawasan ini. *Kedua*, diharapkan kerjasama itu akan mening-

²⁹J. Stephen Hoadley, "New Zealand and Indonesia: The Evolving Relationship in Regional Perspective," *Indonesian Quarterly*, Vol. III, No. 4 (Juli 1975), hal. 69.

³⁰Lihat T.B. Millar, *Australia in Peace and War* (Canberra: The Australian National University Press, 1978), hal. 182, 318, 319.

PAPUA NUGINI

Politik Konfrontasi yang dianut Indonesia dalam tahun 1960-an atas Irian Barat dan terhadap Malaysia menimbulkan suatu dampak negatif, yaitu "Indophobia" bagi negara-negara tetangga Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia sejak tahun 1967 telah menerapkan suatu pendekatan diplomasi bertetangga baik seperti normalisasi hubungan dengan Malaysia dan pembentukan ASEAN. Tindak lanjut dari itu kemudian terungkap dalam sikap bersahabat yang ditunjukkan oleh Indonesia terhadap Papua Nugini (PNG) ketika negara ini memperoleh hak memerintah sendiri dari Australia pada tahun 1973.³⁴ Hal itu dipertegas lagi dengan dukungan dan pembukaan hubungan diplomatik dengan PNG pada tahun 1975.³⁵ Jadi pendekatan Indonesia itu sangat erat dengan peningkatan reputasi Indonesia di dunia internasional.

Di samping itu, Indonesia mempunyai alasan lain untuk mengadakan hubungan baik dengan PNG. Alasan kedua ini lebih bersifat sekuriti daripada politis. Sejak tahun 1963 ada indikasi yang menunjukkan gejala semakin meningkatnya pengungsi dari Irian Jaya melalui perbatasan ke wilayah PNG dan ada juga yang terlibat dalam gerakan separatis bersenjata/OPM. Kegiatan kelompok itu mengkhawatirkan karena selain beroperasi di perbatasan juga menggunakan wilayah PNG sebagai pangkalan aktivitas militer menentang Indonesia.³⁶ Tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah keterlibatan PNG secara diam-diam atau langsung dalam pergerakan itu. Untuk semua alasan-alasan itu Indonesia mempunyai suatu kepentingan tersendiri dalam menjalin hubungannya dengan PNG.

Masalah utama yang menentukan hubungan bilateral Indonesia dengan PNG adalah pergerakan OPM dan eksodus penduduk Irian Jaya ke PNG. Ancaman yang nyata terhadap Indonesia bukanlah dalam arti militer. Tetapi berlangsungnya suatu kehidupan politik dari pergerakan yang mempunyai tujuan untuk membebaskan Irian Jaya di luar Indonesia akan menarik simpati dan dukungan dari PNG dan Kepulauan Pasifik.

Irian Jaya bagi Indonesia mempunyai arti tersendiri, ia bukan saja sebagai suatu propinsi tetapi merupakan suatu simbol yang mempunyai nilai-nilai nasional dan internasional. Indonesia melihat penyelesaian masalah Irian Jaya

³⁴Lihat Peter Hastings, "The Papua New Guinea - Irian Jaya Border Problem," *The Australian Outlook*, Vol. 31, No. 1 (April 1975), hal. 53.

³⁵*Antara*, 16 September 1975.

³⁶Terence Wesley Smith, "Papua New Guinea: Problems and Prospects," *New Zealand International Review*, Vol. V, No. 3 (Mei/Juni 1980), hal. 10.

Di samping itu pemerintah yang baru melihat adanya suatu interdependensi dalam hubungan kedua negara. Kejadian-kejadian di Indonesia termasuk juga kejadian eksternal yang mengganggu stabilitas Indonesia bisa mempengaruhi PNG.³⁹

Oleh karena itu PNG perlu melihat kembali kebijakan-kebijakannya terhadap OPM dan penyeberang-penyeberang perbatasan ke wilayahnya. Realisasi kebijakan itu terlihat dalam dua hal. *Pertama*, Pemerintah Port Moresby mendesak Pemerintah Vanuatu melarang juru bicara OPM tinggal di Vili dan *kedua*, diadakannya kerjasama Proyek OK Tedi dengan Indonesia. Secara formal hal itu merupakan realisasi Artikel 8 dari Perjanjian Dasar Pengaturan Perbatasan, yaitu melarang segala bentuk aktivitas yang ilegal terhadap masing-masing negara. Bagi Indonesia itu merupakan suatu insentif dari PNG dalam merealisasi kerjasama yang aktif menekan aktivitas OPM.

Pergeseran dari Pemerintah Julius Chan ke Pemerintah PM Somare pada tahun 1982 menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang cukup berarti. Pemerintah Somare semakin menyadari dampak negatif OPM bagi keamanan dan politik PNG. Garis keras terhadap OPM itu mulai tampak dengan digelarnya kesatuan Angkatan Bersenjata PNG di Propinsi Sepik Barat untuk menekan aktivitas OPM.⁴⁰ Penggelaran kekuatan Angkatan Bersenjata PNG yang melibatkan kesatuan dari The Royal Pacific Islands Regiment di Wewak dan keputusan dari Dewan Keamanan Nasional PNG tanggal 30 April 1985 untuk mendesak OPM dari perbatasan merupakan suatu kebijakan "Hot pursuit" yang terselubung. Dengan demikian secara implisit Pemerintah Somare telah berkolaborasi dengan pihak Indonesia menekan gerakan-gerakan OPM di PNG.

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan Indonesia dengan PNG ditentukan oleh masalah perbatasan dan OPM. Sikap-sikap Indonesia terhadap masalah-masalah itu berbeda dengan cara, gaya pihak PNG. Dalam menekan aktivitas-aktivitas OPM, pihak Indonesia tidak mengalami hambatan-hambatan dari dalam negeri. Oleh karena itu Indonesia melihat masalah perbatasan dan OPM lebih bersifat formal dan militer. Sebaliknya pihak PNG dihadapkan oleh tekanan-tekanan dari dalam negeri yang tidak ingin melihat adanya kolaborasi militer dengan Indonesia. Kesenjangan antara pemerintah dan kelompok-kelompok yang berkepentingan itulah yang menimbulkan benturan hubungan dengan Indonesia. Untuk itu diharapkan Indonesia lebih menahan diri untuk tidak memaksakan kebijakannya terhadap pemerintah yang berkuasa di PNG.

³⁹Rowan Callick, "The Lynchpin State," *FEER* (4 Desember 1981), hal. 27.

⁴⁰Stephen V. Harris dan Colin Brown, "Indonesia, Papua New Guinea and Australia: The Irian Jaya Problem of 1984," *Australia-Asia Papers* (Nathan, Australia: Centre for the Study of Australian-Asia Relations School of Modern Asian Studies, Februari 1985), No. 29, hal. 37.

konperensi kerja di Mekkah dan menyusun suatu program perjuangan: (1) memusatkan tantangan terhadap campur tangan bersenjata Inggris di Indonesia dan menganggap Belanda sebagai pembonceng yang tidak berdaya; (2) membebaskan warga Indonesia dari perwalian kedutaan-kedutaan Belanda; (3) menunjuk Kairo sebagai pusat panitia-panitia di Timur Tengah karena Liga Arab bermarkas di situ.

Sesuai dengan itu, para mahasiswa Indonesia di Kairo menolak perwalian Belanda dan pada tanggal 23 Maret 1946 Pemerintah Mesir mengakui hal itu dengan menegaskan: "Dari saat ini juga Pemerintah Mesir menganggap warga Indonesia di Mesir tidak lagi ada hubungan dengan Kedutaan Belanda, dan dalam segala hal yang menyangkut mereka, Pemerintah Mesir hanya akan berhubungan dengan Panitia."² Negara-negara Arab lain segera menyusul. Secara demikian mereka mengakui kemerdekaan Indonesia. Panitia-panitia Pembela Kemerdekaan Indonesia dianggap sebagai Perwakilan Sementara RI yang berhak mengeluarkan Surat Keterangan sebagai paspor.

Atas desakan panitia-panitia itu, Dewan Menteri Luar Negeri Liga Arab membicarakan soal pengakuan atas RI pada 18 Nopember 1946 dan mengambil suatu keputusan untuk mengamanatkan kepada negara-negara Arab anggotanya agar mengakui RI sebagai negara yang merdeka. Sekretaris Jendral Liga Arab menyampaikan keputusan itu kepada Pemerintah Indonesia dengan surat tanggal 28 Nopember 1946. Dengan persetujuan Pemerintah Mesir, ia menugaskan Konsul Jenderal Mesir di Bombay, Muhammad Abdul Mun'im, untuk pergi ke Indonesia dan menyampaikan keputusan tersebut. Utusan Liga Arab dan Mesir ini berhasil menembus blokade Belanda dan pada 15 Maret 1947 menyampaikan surat Sekretaris Jenderal Liga Arab tersebut dan surat pengakuan Pemerintah Mesir kepada Pemerintah RI.³

Atas saran utusan Liga Arab itu, Pemerintah Indonesia mengirimkan suatu delegasi di bawah pimpinan Agus Salim ke Timur Tengah. Delegasi mengadakan perundingan-perundingan dengan Pemerintah Mesir dan sebagai hasilnya ditandatangani di Kairo pada 10 Juni 1947 Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir. Ditandatangani pula Persetujuan Mengadakan Hubungan Diplomasi dan Konsuler serta Perjanjian Perdagangan antara kedua negara. Sebagai kelanjutan, pada 7 Agustus 1947 Agus Salim membuka Perwakilan RI di Mesir dan mengangkat H.M. Rasyidi sebagai kepalanya dengan kedudukan Charge d'Affairs. Perwakilan ini merangkap sebagai Misi Diplomatik Tetap RI untuk negara-negara Liga Arab yang lain. Misi ini mengunjungi negara-negara itu dan mendapatkan pengakuan mereka untuk RI. Selain itu

²*Ibid.*

³*Ibid.*

PBB untuk mendukung nasionalisasi itu. Sebaliknya negara-negara Timur Tengah dan Afrika mendukung perjuangan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat. Secara demikian solidaritas antara mereka meningkat dan semakin kuat.⁸

Pada tahap berikutnya Indonesia mulai merintis kerjasama dengan negara-negara Timur Tengah dan Afrika dalam rangka pelaksanaan program pemerintah yang disampaikan PM Ali Sastroamidjojo kepada DPR pada bulan Agustus 1953 sebagai berikut:

"Karena kita yakin bahwa kerjasama yang erat antara negara-negara Asia-Afrika akan memperkuat usaha-usaha ke arah mencapai perdamaian dunia yang abadi, maka kita menganggap kerjasama antara negara-negara itu sangat penting.... Mulai dari sekarang kita akan meniskuskan dan memperkuat kerjasama antara negara-negara ini."⁹

Pernyataan itu menjadi landasan bagi usaha-usaha memupuk solidaritas Asia-Afrika dan menyusun kekuatan bersama dalam menghadapi masalah-masalah dunia di forum-forum internasional demi tercapainya perdamaian dunia dan kepentingan bersama.

Untuk mewujudkan kerjasama itu, Indonesia kemudian mengambil prakarsa untuk mengadakan konperensi bangsa-bangsa Asia dan Afrika, yang diabdikan pada perjuangan bangsa-bangsa yang masih terjajah untuk mendapatkan kemerdekaan. PM Ali Sastroamidjojo mengusulkannya pada konperensi para Perdana Menteri lima negara di Kolombo tahun 1954. Konperensi membicarakan hal itu dan menerima baik sebuah usul agar Indonesia menyelidiki kemungkinannya. Dalam Konperensi Perdana Menteri kelima negara yang diadakan di Bogor bulan Desember 1954, Indonesia melaporkan bahwa dari 14 negara yang dihubunginya 12 telah memberikan jawaban positif. Maka tercapailah kata sepakat untuk mengadakan konperensi semacam itu. Selain menyetujui bahwa konperensi itu harus mendapatkan dukungan bersama dalam pelaksanaannya, para Perdana Menteri memutuskan untuk mengadakannya di Indonesia pada bulan April 1955.¹⁰

Tujuan konperensi adalah: (1) memajukan itikad baik dan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika, menjajagi dan memajukan kepentingan bersama, baik yang silih ganti maupun yang bersama, serta meletakkan dan

⁸Lihat Roeslan Abdulgani, *loc. cit.*

⁹Lihat Ide Anak Agung Gde Agung, *Twenty Years Indonesian Foreign Policy* (Paris: Mouton, 1975), hal. 204.

¹⁰Lihat Roeslan Abdulgani, *Sejarah, Cita-cita dan Pengaruhnya Konperensi Asia-Afrika Bandung* (Jakarta: Idayu, 1977), hal. 7-10. Penulis adalah Sekretaris Jenderal Konperensi. Lihat juga Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hal. 204-215.

pemikiran-pemikiran yang melatarbelakanginya pada umumnya disebut Semangat Bandung. Berkat semangat ini, Majelis Umum PBB pada tahun 1960 mengeluarkan suatu resolusi yang terkenal, yaitu Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negeri-negeri dan Bangsa-bangsa Terjajah, yang kemudian lebih dikenal sebagai Resolusi Dekolonisasi.¹³ Untuk melaksanakan resolusi ini dibentuk suatu panitia di mana Indonesia duduk sebagai anggota. Sejak itu proses dekolonisasi berjalan dengan cepatnya. Jika pada tahun 1955 baru ada 6 negara Afrika dan 11 negara Timur Tengah yang telah merdeka, kini terdapat 51 negara Afrika dan 25 negara Timur Tengah yang merdeka. Dalam proses ini Indonesia memainkan peranan yang besar dan sehubungan dengan itu mendapat nama baik di Timur Tengah maupun Afrika.

Di bawah demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia menyimpang dari asas bebas dan aktif yang dianutnya sejauh itu. Presiden Soekarno mengutuk sistem internasional yang berlaku sebagai sistem pemerasan "the old established forces" (Oldefos) terhadap "the new emerging forces" (Nefos). Oleh sebab itu Indonesia harus memimpin usaha menghimpun kekuatan-kekuatan progresif di dunia dalam suatu front internasional untuk kemerdekaan dan perdamaian melawan imperialisme dan kolonialisme. Presiden Soekarno menguraikan gagasan-gagasan itu pada KTT Non-Blok I di Beograd tahun 1961. Ia menegaskan bahwa tujuan konperensi adalah ikut melancarkan perang melawan sisa-sisa kolonialisme dan imperialisme. Ia menginginkan agar konperensi menempuh suatu jalan radikal dalam keputusan-keputusannya. Akan tetapi gagasannya itu tidak mendapatkan tanggapan unanin dari para peserta konperensi.¹⁴

Sehubungan dengan itu Indonesia menempuh kebijaksanaan baru. *Pertama*, ia mengirimkan "Misi Safari Berdikari" ke sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika untuk mendapatkan dukungan bagi gagasan tersebut. Akan tetapi usaha itu ternyata sia-sia. Negara-negara tersebut tidak yakin akan ketetapanannya. Selain itu, Indonesia membentuk Poros Jakarta-Beijing untuk menghadapi kolonialisme dan imperialisme. RRC adalah satu-satunya negara yang mendukung gagasan tersebut sepenuhnya.¹⁵

Salah satu ungkapan politik luar negeri Indonesia yang baru itu adalah konfrontasi terhadap Malaysia (1963-1966) yang dianggap sebagai ciptaan im-

¹³*Ibid.*

¹⁴Lihat pidato Bung Karno, "Towards Freedom, Peace and Justice," dalam *Selected Documents* (Jakarta), Book I, hal. 125-126. Lihat juga Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hal. 312-342.

¹⁵Lihat Sumaryo Suryokusumo, *op. cit.*, hal. 53.

negara Barat yang umumnya mendukung Israel.

Di bidang ekonomi hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah kurang menggembirakan. Hubungan kebudayaan yang erat itu ternyata bukan jaminan bagi lancarnya hubungan di bidang-bidang lain, khususnya bidang ekonomi. Dari petrodollar yang sejak tahun 1974 menumpuk di Timur Tengah, Indonesia hanya mendapatkan bagian yang kecil sekali dibandingkan dengan besarnya bantuan dan investasi Arab untuk negara-negara lain. Ketika negara-negara industri dan negara-negara yang berkembang yang dinamis seperti Korea Selatan, Taiwan, India dan Pakistan berlomba memasuki pasaran Timur Tengah dengan melemparkan produksi mereka, mendapatkan kontrak-kontrak pembangunan yang besar, mengirim ribuan tenaga kerja dan lain sebagainya, Indonesia tidak banyak berbuat untuk mendapatkan bagian dari kekayaan baru itu karena tidak tahu apa yang harus diperbuat, biarpun merasa dekat dengan negara-negara Arab karena seagama. Baru kemudian didirikan suatu perwakilan dagang di Jeddah dan dibentuk suatu team untuk menggalakkan perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah.

Sebelum Perang Dunia II Arab Saudi merupakan pasaran teh Indonesia yang besar. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, perdagangan antara mereka tidak mengalami kenaikan. Bahkan sejumlah komoditi Indonesia memasuki pasaran Timur Tengah melalui negara-negara ketiga seperti Singapura, Hongkong dan Taiwan. Kalau negara-negara lain beramai-ramai meningkatkan ekspor barang-barang industri, tenaga kerja, ahli-ahli dan kontraktor-kontraktor ke Timur Tengah, Indonesia justru mengimpor minyak mentah dan hasil-hasilnya dari Arab Saudi, tahun 1979 seharga 356 juta dollar AS. Sejauh ini ekspor Indonesia ke Timur Tengah tidak banyak berarti, pada tahun 1979 hanya 75 juta dollar AS, padahal negara-negara Arab merupakan pasaran yang besar impornya puluhan milyar dollar AS per tahun.¹⁷

Dengan demikian Indonesia sangat ketinggalan dalam perlombaan meningkatkan perdagangan dan hubungan ekonomi dengan Timur Tengah, sehingga kehilangan suatu peluang emas. Ketika ia berusaha meningkatkan peranannya, persaingan yang dihadapinya sangat kuat. Negara-negara yang mempunyai banyak hubungan ekonomi dengan kawasan itu bukan saja diwakili oleh para pengusaha dan kontraktor yang bonafide dan ulet, tetapi juga dapat bersaing dalam mutu barang serta jasa dan didukung modal serta cara pembayaran yang kuat. Mereka mendapat dukungan bank-bank besar.

Ketika Indonesia mengusahakan diversifikasi bantuan luar negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan tambahan modal untuk meneruskan pembangunan nasional sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang semakin meningkat dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dan dalam rangka mengurangi

¹⁷Lihat *Ekspor 1979* (Jakarta: BPS, 1980), hal. 1.

sama ekonomi yang berarti bagi pembangunan nasional Indonesia. Sehubungan dengan itu dan sebagai penghematan, Indonesia menutup perwakilannya di berbagai negara: Sudan, Maroko, Ghana, Somalia, Guinea dan Kongo.²¹ Hanya perwakilan di negara-negara yang dianggap penting dan berpengaruh seperti Mesir, Tunisia, Aljazair, Ethiopia, Tanzania dan Malagasi dipertahankan. Hal itu dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru dalam rangka pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama pembangunan ekonomi yang merupakan prioritas pembangunan nasional. Di samping pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan ekonomi mendasari kebijaksanaan itu. Dengan negara-negara itu Indonesia menjalin kerjasama ekonomi berupa perdagangan yang bisa ditingkatkan.²²

Indonesia juga bekerjasama dengan negara-negara Afrika di forum-forum internasional seperti PBB dan badan-badannya, gerakan Non-Blok, Kelompok 77, OKI, dan OPEC, bukan saja demi terwujudnya tata dunia baru dan tata ekonomi dunia baru, melainkan juga demi kepentingan nasional pihak-pihak. Dalam rangka itu pula Indonesia berusaha memajukan solidaritas dan kesatuan sikap negara-negara berkembang, termasuk negara-negara Afrika. Dengan mereka Indonesia berjuang untuk menghapus proteksionisme negara-negara industri dan mengadakan kerjasama teknik.

Berdasarkan solidaritas dengan negara-negara Afrika, Indonesia mengikuti dengan seksama perkembangan yang terjadi di benua itu dan mendukung perjuangan mereka untuk melenyapkan politik rasial apartheid Afrika Selatan dan mencapai kemerdekaan bangsa Namibia yang masih dijajah. Indonesia selalu mendukung gerakan-gerakan pembebasan nasional bangsa-bangsa yang masih dijajah. Dalam rangka itu Indonesia mempertahankan keanggotaannya dalam dua badan PBB yang penting bagi perjuangan bangsa Afrika, yaitu Komite Dekolonisasi dan Dewan Namibia PBB.

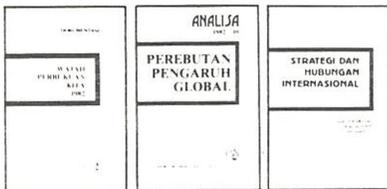
Kalau di bawah Orde Baru politik luar negeri kita mula-mula bersifat "low profile" dan "low key," setelah Indonesia berhasil melaksanakan beberapa Pelita dengan baik dan mencapai kemajuan-kemajuan serta stabilitas nasional, ia mulai menjalankan politik bebas aktifnya secara lebih dinamis, khususnya melalui forum-forum dan kerjasama internasional. Faktor lain perubahan itu adalah kenyataan bahwa Timor Timur yang telah bergabung dengan Indonesia pada tahun 1976 dipermasalahkan di PBB dengan tuduhan bahwa integrasi itu tidak sah. Mayoritas negara Afrika dan Timur Tengah mementang posisi Indonesia.

²¹Lihat Sumaryo Suryokusumo, *op. cit.*, hal. 54-55.

²²*Ibid.*, hal. 55.

mencari perluasan pasar-pasar baru bagi barang produksi Indonesia dalam rangka meningkatkan penerimaan dari luar negeri. Akan tetapi mereka juga tidak boleh lupa bahwa Indonesia pada batas-batas kemampuannya serta dengan perhitungan matang tetap aktif mengusahakan tercapainya ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, adil dan makmur sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

Sebagai penutup, selama 40 tahun politik luar negeri Indonesia terhadap Timur Tengah dan Afrika mengalami pergeseran-pergeseran fokus dan mengenal pasang-surut. Di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia sangat aktif di dunia internasional dan segi politik kebijaksanaan luar negerinya sangat menonjol. Sebaliknya di bawah Orde Baru kegiatan luar negeri Indonesia agak berkurang dan segi ekonominya lebih menonjol sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional yang diutamakan sebagai kepentingan nasionalnya. Sebagai keseluruhan, politik luar negeri Indonesia di Timur Tengah dan Afrika mengalami kemajuan dalam arti bahwa Indonesia menjalin hubungan yang semakin luas dengan semakin banyak negara untuk kepentingan nasional masing-masing maupun untuk mewujudkan tata dunia baru yang lebih baik. Akan tetapi hubungan-hubungan itu masih dapat dan harus ditingkatkan dan diperluas baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi dan sosial-budaya.



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa buku-buku dan terbitan berkala:

BUKU-BUKU

Berbagai buku baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, hasil penulisan staf CSIS mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.

ANALISA

Majalah bulanan, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi ac'n politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Harga per eks Rp 750,— langganan setahun (12 nomor) Rp 9.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp 6.750,—

THE INDOONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulanan berbahasa Inggris, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan-paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp 1.000,—, langganan setahun (4 nomor) Rp 4.000,—, untuk Mahasiswa Rp 3.200,—

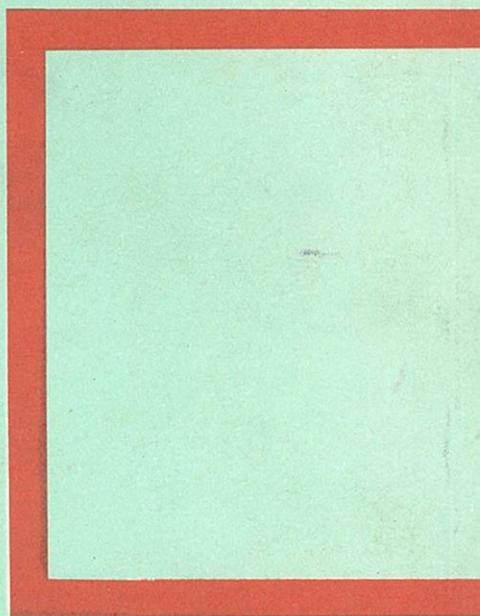
DOKUMENTASI

Kumpulan clipping berbagai surat kabar/bulletin secara sistematis mengenai masalah-masalah tertentu.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada: **BIRO PUBLIKASI — CSIS**
CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
 Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 s/d 356535

Untuk menunjang kegiatan pengkajian, CSIS juga menyediakan **PERPUSTAKAAN** dan **CLIPPINGS** yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN dan BIRO INFORMASI DAN DATA — CSIS
 Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 - 35





BUKU-BUKU TERBITAN CSIS

Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti,
lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum.

SEKAR SEMERBAK:

Kenangan untuk ALI MOERTOPO

ix + 341 hal., @ Rp 5.000,00



Buku ini merupakan peringatan satu tahun wafatnya Ali Moertopo. Isinya meliputi berbagai hal yang diperkirakan menjadi minat almarhum semasa hidupnya, yang ditulis oleh Toeti Adhitama, F.R. Dalrymple, Derek Davies, Sukamdani S. Gitosardjono, Michael Leifer, Alejandro Melchor Jr., Goenawan Mohamad, David Newsom, A.R. Ramly, Robert A. Scalapino, Sabam Siagian, A.R. Soehoed, Soemitro, Soerjadi, Juwono Sudarsono, G. Sugiharto, H.N. Sumual, Sayidiman Suryohadiprojo, Abdurrahman Suryomihardjo, George K. Tanham, Abdul Gafur, Harry Tjan Silalahi.

SEJARAH PEMIKIRAN TENTANG PANCASILA

A.M.W. PRANARKA, xi + 509 hal., @ Rp 7.500,00



Disertasi ini diterbitkan karena mempunyai relevansi di bidang epistemologi dan ideologi. Perkembangan pemikiran mengenai Pancasila dewasa ini akhirnya memerlukan adanya penataan epistemologis, sehingga perkembangan pemikiran mengenai Pancasila melalui berbagai jalur dan berbagai pendekatan itu akan terjadi dalam suasana "rukun-patut-laras" tanpa terjerumus ke dalam subjektivisme, dogmatisme atau eklektisisme. Buku ini juga memberikan dokumentasi yang lengkap mengenai pemikiran dan pengkajian tentang Pancasila dan akan sangat berguna bagi usaha-usaha pendalaman selanjutnya.

Masih Tersedia:

1. PANDANGAN PRESIDEN SOEHARTO TENTANG PANCASILA, Cet. ke-7, 1984 xviii + 95 hal., edisi HVS @ Rp 1.200,00, edisi biasa @ Rp 600,00
2. PANCASILA ARTI DAN PELAKSANAANNYA, Kirdi DIPOYUDDO, Cet. ke-2, x + 124 hal., @ Rp 1.750,00
3. STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL, ALI MOERTOPO, Cet. ke-2, 1982 xxii + 259 hal., @ Rp 4.000,00
4. STRATEGI DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL: INDONESIA DI KAWASAN ASIA-PASIFIK, Penyunting: Hadi SOESASTRO dan A.R. SUTOPO, 1981, xxiv + 640 hal., @ Rp 7.000,00
5. PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM BISNIS INTERNASIONAL, J. PANGLAYKIM, 1983, xii + 348 hal., @ Rp 3.500,00
6. GOLKAR: FUNCTIONAL GROUP POLITICS IN INDONESIA, Julian M. BOILEAU, 1983, viii + 140 hal., @ Rp 2.250,00

7. AFRIKA DALAM PERGOLAKAN-2, Kirdi DIPOYUDDO, 1983, xiv + 208 hal., @ Rp 2.750,00
8. ENERGI DAN PEMERATAAN, Hadi SOESASTRO et al., 1983, viii + 289 hal., @ Rp 3.500,00
9. PACIFIC ECONOMIC COOPERATION: THE NEXT PHASE, editor: Hadi SOESASTRO dan HAN Sung-joo, 1983, xiv + 302 hal., @ Rp 3.750,00
10. PEACE AND SECURITY IN THE ATLANTIC AND PACIFIC REGIONS, 1983, x + 293 hal., @ Rp 3.750,00
11. ISSUES FOR PACIFIC ECONOMIC COOPERATION, 1983, vi + 142 hal., Rp 4.250,00
12. REGIONAL DIMENSIONS OF INDONESIA-AUSTRALIA RELATIONS, 1984, viii + 124 hal., @ Rp 2.000,00
13. INTERNAL DEVELOPMENTS IN JAPAN AND INDONESIA, 1985, x + 90 hal., @ Rp 1.500,00

ANALISA:

Terbit setiap bulan, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, @ Rp 750,00. Langganan setahun (12 nomor) Rp 9.000,00 sudah termasuk ongkos kirim, untuk mahasiswa Rp 6.750,00/tahun. Masih tersedia nomor-nomor lepas dari yang sudah terbit.

- 1/1984: MELAKSANAKAN PANCASILA
- 2/1984: KERJASAMA EKONOMI PASIFIK
- 3/1984: PERSPEKTIF PELITA IV
- 4/1984: MASALAH KAMPUCHEA DAN HUBUNGAN INDONESIA-VIETNAM
- 5/1984: PENDIDIKAN DAN BEBERAPA TANTANGAN
- 6/1984: JEPANG DALAM MASA TRANSISI
- 7/1984: DAMPAK HUBUNGAN TIMUR-BARAT DI BEBERAPA KAWASAN
- 8/1984: MEMBANGUN DEMOKRASI

SERI DOKUMENTASI:

Kumpulan clipping berbagai surat kabar dan bulletin, dengan berbagai subjek dan masalah baik dalam negeri maupun internasional. Nomor-nomor terbaru antara lain:

1. PRA-INTEGRASI TIMOR TIMUR 1975 (67/P/XI/1983), xv + 225 hal., Rp 9.000,00
2. INTEGRASI TIMOR TIMUR 1976 (I), (68/P/XI/1983), xi + 156 hal., Rp 6.500,00
3. INTEGRASI TIMOR TIMUR 1976 (III), (69/P/XI/1983), ix + 111 hal., Rp 5.000,00
4. MUNAS III GOLKAR 1983 (Bagian I), (70/P/III/1984), v + 105 hal., Rp 4.750,00
5. MUNAS III GOLKAR 1983 (Bagian II), (71/P/III/1984), xiv + 158 hal., Rp 6.500,00
6. DIPLOMASI TENTANG TIMOR TIMUR (72/P/III/1984), ix + 146 hal., Rp 5.750,00
7. PEMBANGUNAN TIMOR TIMUR 1977-1982 (73/P/III/1984), v + 115 hal., Rp 5.000,00
8. PAKET 1 JUNI 1983 (74/E/IV/1984), x + 199 hal., Rp 8.000,00
9. KOMINOK 1, JAKARTA 1984 (75/P/VI/1984), xiii + 178 hal., Rp 7.500,00
10. HUBUNGAN RI-UNI SOVIET 5 TAHUN TERAKHIR (1980-1984), (76/VI/III/1984), xiv + 208 hal., Rp 8.500,00
11. GERAKAN WAJIB BELAJAR (77/PD/IX/1984), ix + 159 hal., Rp 6.500,00

TERBITAN BERKALA:

- 9/1984: PEMBAURAN DAN TANTANGANNYA
- 10/1984: MEMBANGUN PEDESAAN
- 11/1984: NATIONALISME DAN PEMBENTUKAN BANGSA
- 12/1984: INDONESIA MEMPERLUAS CAKRAWALA

- 1/1985: MASALAH EKONOMI YANG RUMIT DAN PEMECAHANNYA
- 2/1985: PERKEMBANGAN DEMOKRASI DAN POLITIK INDONESIA
- 3/1985: MENGGALAKAN KEGIATAN EKONOMI
- 4/1985: ASIA-AFRIKA DAN PERKEMBANGAN KAWASAN
- 5/1985: PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
- 6/1985: MENGGALAKAN EKSPOR DAN MUNCULNYA KELAS MENENGAH
- 7/1985: MASALAH PEMBANGUNAN DAN KEPENDUDUKAN

12. ASAS TUNGGAL (78/P/II/1985), viii + 166 hal., Rp 7.000,00
13. MONOPOLI DAN OLIGOPOLI (79/E/III/1985), ii + 58 hal., Rp 3.000,00
14. UNIVERSITAS TERBUKA (80/PD/III/1985), vii + 168 hal., Rp 6.750,00
15. ORDE BARU (81/P/IV/1985), viii + 203 hal., Rp 8.250,00
16. KONFLIK KAMBOJA (IV), (82/HI/V/1985), ix + 186 hal., Rp 8.000,00
17. KONFLIK KAMBOJA (VI), (83/HI/V/1985), xvii + 287 hal., Rp 11.000,00
18. PEMILU AMERIKA SERIKAT 1984 (84/HI/V/1985), xiii + 232 hal., Rp 9.000,00
19. INPRES NO. 4, 1985 (85/E/VI/1985), xv + 247 hal., Rp 10.000,00
20. PERINGATAN 30 TAHUN KAA (86/P/VII/1985), xiv + 290 hal., Rp 11.000,00
21. RI-RRC (87/E/VII/1985), xiii + 194 hal., Rp 8.250,00
22. PEMBAJAKAN UDARA (88/HI/VII/1985), ix + 149 hal., Rp 6.250,00
23. TIMOR TIMUR 1983 (89/P/VIII/1985), xiii + 179 hal., Rp 7.500,00
24. PEMBAHASAN 5 RUU BIDANG POLITIK (Jilid ke-1), (90/P/VIII/1985), vii + 120 hal., Rp 5.250,00
25. PEMBAHASAN 5 RUU BIDANG POLITIK (Jilid ke-2), (91/P/VIII/1985), viii + 124 hal., Rp 5.250,00
26. PEMBAHASAN 5 RUU BIDANG POLITIK (Jilid ke-3), (92/P/VIII/1985), x + 207 hal., Rp 8.500,00

Dalam rangka itu Indonesia berusaha meningkatkan kehadiran dan kegiatannya di Afrika maupun Timur Tengah dengan mengirimkan utusan-utusan dan membuka perwakilan-perwakilan baru. Seperti kita lihat di atas, pada tahun 1977 Presiden Soeharto sendiri mengadakan kunjungan ke Mesir, Arab Saudi, Kuwait, Suriah, Bahrain, Qatar dan Uni Emirat Arab, dan berhasil mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara itu dan mendapatkan dukungan mereka dalam masalah Timor Timur. Pada tahun 1982 Menlu Indonesia mengadakan kunjungan ke beberapa negara Afrika -- Senegal, Gambia, Gabon, Pantai Gading dan Kenya -- untuk menjajaki kemungkinan membuka hubungan diplomasi dan meningkatkan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara-negara benua itu.²³ Selain itu Indonesia menawarkan kerjasama teknik kepada sejumlah negara Afrika dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Teknik Negara-negara Berkembang (TCDC) yang disponsori PBB.

Sebagai kelanjutan, Indonesia membuka sejumlah perwakilan baru di Timur Tengah maupun Afrika dan mengadakan kerjasama teknik dengan sejumlah negara Afrika seperti Tanzania, Somalia, Ethiopia, Malagasi dan lain-lain. Sebagai hasilnya, di Timur Tengah Indonesia kini mempunyai hubungan diplomasi dengan 17 negara, yaitu Arab Saudi, Kuwait, Irak, Iran, Oman, Uni Emirat Arab, Aljazair, Mesir, Sudan, Libanon, Suriah, Yordania, Qatar, Bahrain, Turki dan Tunisia. Di Afrika Indonesia juga mempunyai hubungan diplomasi dengan 17 negara, yaitu Aljazair, Guinea, Mali, Mesir, Sudan, Ethiopia, Kenya, Malagasi, Nigeria, Ghana, Liberia, Senegal, Gabon, Cape Verde, Tunisia, Somalia dan Tanzania. Sebagian perwakilan-perwakilan itu dirangkap oleh perwakilan lain. Duta besar kita di Mesir misalnya merangkap sebagai wakil Indonesia untuk Sudan dan Libanon.²⁴

Di negara-negara itu -- seperti di negara-negara lain -- para diplomat Indonesia bukan hanya bertugas untuk melaksanakan diplomasi rutin, melainkan juga diplomasi perjuangan, yang pernah dibatasi oleh Presiden Soeharto sebagai berikut: "Diplomasi perjuangan adalah keuletan dan kelincahan dalam memperjuangkan, aspirasi-aspirasi, cita-cita dan kepentingan nasional. Diplomasi perjuangan mengharuskan para diplomat kita tidak hanya mengikatkan diri pada kebiasaan-kebiasaan resmi dan keprotokolan saja, melainkan harus dapat menemukan dan mengembangkan cara-cara lain yang efektif."²⁵ Karena pada tahap sekarang ini kepentingan nasional adalah pembangunan nasional, maka para diplomat Indonesia juga ditugaskan untuk

²³*Ibid.*, hal. 62.

²⁴Lihat *Indonesia 1985: An Official Handbook* (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1985), hal. 239-243.

²⁵Pidato Presiden Soeharto pada pelantikan duta-duta besar baru di Jakarta tanggal 12 September 1978. Lihat *Antara*, 12 September 1978/B.

ketergantungannya pada negara-negara tertentu, ia berpaling ke negara-negara Timur Tengah untuk mendapatkan bagian dari petrodollar mereka yang melimpah, tetapi hasilnya sejauh ini kurang menggembirakan. Tidak semua negara Timur Tengah menanamkan modalnya di luar negeri, dan mereka yang melakukannya seperti Arab Saudi, Kuwait, Iran dan Uni Emirat Arab melakukannya melalui bank-bank internasional. Dengan demikian dasar investasi mereka di luar negeri menganut asas-asas bisnis untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Indonesia hampir tidak masuk jangkauan investasi negara-negara Timur Tengah, biarpun berhasil mendapatkan sedikit bantuan dari beberapa negara.

Keadaannya menjadi lebih baik setelah Presiden Soeharto mengadakan kunjungan kenegaraan ke Iran (Juni 1975) dan sejumlah negara Arab seperti Mesir, Arab Saudi, Kuwait, Suriah, Bahrain dan Uni Emirat Arab (Oktober 1977). Kunjungan ini dilakukan selain untuk menyelami aspirasi-aspirasi perjuangan mereka dan menyatakan dukungan Indonesia baginya juga untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama dan mencari bantuan kredit serta modal investasi. Presiden Soeharto juga berusaha mencari dukungan negara-negara Arab dalam soal Timor Timur dengan memberikan penjelasan.¹⁸

Pada tahun 1975 Iran memberikan pinjaman sebesar 200 juta dollar AS untuk pembangunan suatu pabrik pupuk urea di Jawa Barat.¹⁹ Dari Arab Saudi Indonesia berhasil mendapatkan pinjaman 100 juta dollar AS untuk proyek-proyek pembangunan dan 76 juta dollar AS untuk perluasan pabrik pupuk Pusri di Palembang. Kuwait dan Abu Dhabi juga telah memberikan bantuan berupa pinjaman yang lebih kecil. Sementara itu beberapa perusahaan kontraktor ikut berlomba untuk memenangkan tender-tender di Timur Tengah dan mencapai beberapa hasil.

Selain itu Indonesia bekerjasama dengan negara-negara Timur Tengah di forum-forum internasional seperti PBB, gerakan Non-Blok, Kelompok 77, OPEC dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan bersama dan terwujudnya tata dunia baru yang lebih baik dan tata ekonomi dunia baru yang akan lebih menjamin kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang.

Kebijaksanaan luar negeri Orde Baru yang menekankan kepentingan nasional dan pembangunan ekonomi mempunyai dampak atas hubungannya dengan Afrika. Kepentingan Indonesia di benua itu lebih bersifat politis karena dari negara-negara Afrika belum dapat diharapkan adanya kerja-

¹⁸Lihat *Antara*, 20 Oktober 1977/B.

¹⁹Lihat *Berita Buana*, 11 Maret 1975.

²⁰Lihat *Antara*, 5 Juni 1975/B dan 25 Juni 1976/B.

perialis untuk mengepung Indonesia. Puncaknya dicapai ketika Malaysia diterima sebagai anggota Dewan Keamanan. Presiden Soekarno mengecam PBB sebagai dikuasai negara-negara imperialis dan menyatakan maksudnya untuk menarik Indonesia dari badan itu, sambil menyatakan keinginannya untuk membentuk "Conference of the New Emerging Forces" (Conefo) sebagai organisasi tandingan dengan markas besarnya di Jakarta. Indonesia jadi keluar dari PBB tetapi usaha-usahanya untuk membentuk Conefo dihentikan ketika kekuasaan bergeser dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto selaku pemimpin Orde Baru yang lahir menyusul kegagalan Pemberontakan G-30-S/PKI dan penumpasannya.

Dengan lahirnya Orde Baru, terjadi perubahan-perubahan penting dalam politik luar negeri Indonesia. Kalau di bawah pemerintahan Presiden Soekarno Indonesia meninggalkan sikap non-blok dan membentuk poros dengan RRC, di bawah Orde Baru ia segera menekankan pembangunan ekonomi dan kembali kepada politik non-blok, sambil meninggalkan poros dengan RRC. Namun perkembangan ini tidak lain ialah kembali ke pokok-pokok politik luar negeri Indonesia yang semula. Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif dan non-blok.

Di bawah Orde Baru Indonesia mempertahankan hubungan-hubungan yang telah dijalinnya dengan negara-negara Timur Tengah tetapi mula-mula tidak memberikan prioritas kepada kawasan ini. Seperti sebelumnya, Indonesia kurang memperhatikan segi-segi hubungan internasional selain hubungan kebudayaan dan politik. Ia merasa bahwa hubungan kebudayaan yang erat sudah cukup untuk membuka pintu bagi hubungan di bidang-bidang lain. Berdasarkan hubungan kebudayaan itu ia mengira bahwa negara-negara Arab akan menunjukkan solidaritas yang besar terhadapnya. Akan tetapi kenyataannya berlainan. Ketika hangat-hangatnya memperjuangkan Timor Timur di PBB, Indonesia mengharapkan dukungan dari negara-negara itu sebagai imbalan bagi dukungan yang diberikannya kepada mereka dalam sengketa Arab-Israel dan lain-lain persoalan. Akan tetapi dalam pungutan suara di PBB, hanya sedikit negara Arab memberikan dukungan. Baru setelah Presiden Soeharto mengadakan kunjungan ke beberapa negara Timur Tengah pada bulan Oktober 1977, lebih banyak negara Arab mendukung Indonesia.¹⁶

Akan tetapi dukungan Indonesia untuk negara-negara Arab dalam sengketa Arab-Israel sendiri juga mengalami pasang-surut. Sampai 1956 Indonesia dengan tegas di pihak Arab, tetapi dalam Perang Arab-Israel 1967 sikapnya tidak begitu jelas, sehingga sementara negara Arab berpendapat bahwa posisi Indonesia sejak itu lebih menguntungkan Israel. Kenyataannya, sejak lahirnya Orde Baru Indonesia menjalin hubungan ekonomi yang erat dengan negara-

¹⁶Lihat O. Sutomo Roesnadi, "Hubungan antara Indonesia dan Timur Tengah," *Analisa*, Tahun VIII, No. 3, Maret 1979, hal. 251.

memajukan persahabatan dan hubungan bertetangga baik; (2) mempelajari masalah-masalah sosial, ekonomi dan kebudayaan negara-negara yang diwakili; (3) mempelajari masalah-masalah yang merupakan kepentingan khusus bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika, yaitu masalah-masalah mengenai kedaulatan nasional, sosialisme dan kolonialisme; dan (4) meninjau kedudukan Asia dan Afrika serta rakyatnya di dalam dunia waktu itu dan sumbangan yang dapat mereka berikan untuk memajukan perdamaian dunia dan kerjasama internasional.¹¹

Kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah dianggap sebagai prasyarat yang harus dipenuhi bagi usaha-usaha untuk membangun suatu dunia baru yang lebih baik di mana semua bangsa dapat bekerjasama untuk kesejahteraan rakyat mereka dan untuk perbaikan dunia serta umat manusia seluruhnya.

Konperensi Asia-Afrika yang diadakan di Bandung pada tahun 1955 dan dihadiri 29 negara, termasuk Mesir, Ethiopia, Sudan, Pantai Emas (kini Ghana), Liberia, Irak, Iran, Turki, Yordania, Libia, Libanon, Arab Saudi, Suriah dan Yaman (Utara), mencapai tujuan-tujuannya. Ia bukan saja mengukuhkan persatuan dan solidaritas bangsa-bangsa Asia dan Afrika, melainkan juga merupakan titik tolak yang baru dalam sejarah mereka dan sumber inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah, lagi pula meletakkan dasar bagi ko-eksistensi damai di antara bangsa-bangsa dan dengan demikian memberikan dorongan serta inspirasi bagi pembentukan Gerakan Non-Blok seperti ditegaskan oleh Presiden Srilangka Jayewardane pada pembukaan Sidang Biro Koordinasi Gerakan Non-Blok bulan Juni 1979: "Gerakan Non-Blok telah dicetuskan di Kolombo tahun 1954, dipupuk di Bandung tahun 1955 dan lahir di Beograd tahun 1961."¹²

Konperensi berhasil merumuskan 10 asas dasar ko-eksistensi damai bangsa-bangsa yang kemudian terkenal sebagai Dasasila Bandung dan menyatakan keyakinannya bahwa kerjasama yang bersahabat sesuai dengan asas-asas itu akan membantu secara efektif pemeliharaan dan peningkatan perdamaian dan stabilitas internasional, sedangkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya akan mendatangkan kesejahteraan bersama untuk semua.

Semangat yang terkandung dalam "Deklarasi untuk Memajukan Perdamaian Dunia dan Kerjasama" yang menyatakan kesepuluh asas itu dan

¹¹Lihat Roeslan Abdulgani, *The Bandung Connection Konperensi Asia-Afrika di Bandung Tahun 1955* (Jakarta: Gunung Agung, 1980), hal. 22-23. Lihat juga Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, 214.

¹²Dikutip dari Mochtar Kusumaatmadja *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*, Editor Eddy Damian dan Budtono Kusumohamidjojo (Bandung: Alumni, 1983), hal. 92.

Misi menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Hubungan Diplomatik serta Konsuler dengan Suriah, dan Persetujuan Hubungan Diplomatik dengan Arab Saudi.⁴

Secara demikian Indonesia berhasil menjalin hubungan baik dengan sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika dan mendapatkan dukungan mereka dalam perjuangannya untuk membela kemerdekaannya. Pada waktu sengketa bersenjata Indonesia-Belanda dibicarakan di forum Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, utusan-utusan Arab dengan gih mendukung Indonesia.⁵

Selain itu, Mesir, Ethiopia, Irak, Iran, Libanon, Arab Saudi dan Suriah menerima baik undangan PM India Jawaharlal Nehru untuk menghadiri konferensi yang diadakan di New Delhi pada tahun 1949 untuk membicarakan agresi Belanda yang kedua terhadap Indonesia. Konferensi menyatakan bahwa aksi militer Belanda itu merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB dan tidak sejalan dengan usaha-usaha yang dilakukan Dewan Keamanan PBB dan Komisi Tiga Negara dalam rangka penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda secara damai. Resolusi konferensi dikirimkan kepada Dewan Keamanan yang sedang membicarakan agresi Belanda tersebut, dan sebagian dimasukkan dalam resolusi yang dikeluarkan Dewan.⁶

Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, mulailah tahap kedua politik luar negeri Indonesia terhadap Timur Tengah dan Afrika. Indonesia mendapat kesempatan untuk membalas jasa negara-negara tersebut, dengan mendukung perjuangan rakyat Tunisia, Aljazair dan Maroko untuk mendapatkan kemerdekaan. Indonesia mengizinkan gerakan nasionalis Tunisia dan Aljazair untuk membuka perwakilan di Jakarta dan mengikutsertakan wakil-wakil mereka dalam delegasinya ke konferensi-konferensi internasional serta memberikan paspor RI kepada mereka.⁷ Indonesia juga memihak bangsa Arab dalam sengketanya dengan Israel dan mendukung perjuangan bangsa Arab Palestina untuk mendapatkan hak-hak nasional mereka. Sewaktu Mesir menasionalisasi Terusan Suez pada tahun 1956, Indonesia bersama India berada di barisan depan dalam Konferensi London dan di forum

⁴*Ibid.*

⁵Lihat Roeslan Abdulgani, "Hubungan Indonesia dengan Mesir dan Timur Tengah Sepanjang Sejarah," dalam *Sekitar Perjanjian*, *op. cit.*, hal. 40. Lihat juga Mohammad Roem, "Debat tentang Status Republik Indonesia di Dewan Keamanan" *ibid.*, hal. 62-73.

⁶Lihat Mohammad Roem, "Resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949," dalam *Keyakinan dan Perjuangan. Buku Kenangan untuk Letnan Jenderal Dr. T.B. Simatupang* (Jakarta: Gunung Mulia, 1972), hal. 141-143.

⁷Lihat Sumaryo Suryokusumo, *Politik Luar Negeri RI dalam Menghadapi Perkembangan di Afrika* (Bandung: Alumni, 1985), hal. 49.